

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan pada masing-masing bab, penulis dapat menyimpulkan bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan oleh gerakan sosial perempuan di Irak terutama pada masa pascainvasi merupakan sebuah bentuk perjuangan untuk menjamin hak-hak perempuan yang tertuang dalam regulasi negara. Gerakan sosial perempuan Irak juga berupaya untuk membebaskan perempuan dari berbagai macam bentuk diskriminasi serta kekerasan yang semakin meluas di berbagai wilayah Irak.

Kemunculan gerakan sosial perempuan yang terdiri dari berbagai macam organisasi perempuan di Irak pada awalnya terjadi pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein melalui invasi AS. Ancaman kekerasan serta ketidakstabilan kondisi di Irak direspon oleh para aktivis perempuan dengan mulai membentuk kelompok dan organisasi-organisasi perempuan untuk turut serta membantu mengakomodir bantuan bagi para perempuan di Irak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam konflik di Irak. Perjuangan organisasi-organisasi perempuan tersebut terus berlanjut hingga dapat dilihat sebagai sebuah gerakan sosial merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Tilly. Mereka mampu untuk mengorganisir berbagai agenda terkait dengan isu hak asasi perempuan melalui strategi lobi dan kampanye.

Dalam aktivitasnya, terdapat dua tujuan utama yang menyatukan organisasi-organisasi perempuan di Irak hingga membentuk sebuah gerakan sosial perempuan, yaitu perlawanan terhadap pengesahan Resolusi 137 (permasalahan

personal status) serta pembentukan aturan kuota bagi perempuan dalam struktur pemerintahan di Irak. Gerakan sosial perempuan berhasil melakukan perlawanan terhadap usulan pengesahan Resolusi 137 serta usulan penghapusan kuota bagi perempuan dalam penyusunan Konstitusi baru Irak melalui serangkaian bentuk protes, kampanye, penyampaian petisi, hingga menggalang suara dukungan dari NGO internasional.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan aturan kuota bagi perempuan dalam Dewan Perwakilan sebesar 25% (dimuat dalam Konstitusi 2005 Pasal 49 ayat 4) menjadi jaminan bagi keterwakilan perempuan dalam proses politik di Irak. Suara dan kepentingan perempuan yang cenderung termarginalkan dapat disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan.

Aktivitas yang dilakukan oleh gerakan sosial perempuan merupakan langkah-langkah untuk mencapai kesetaraan serta jaminan hak asasi bagi perempuan dalam regulasi negara, hal inilah yang menjadi tujuan utama dalam perspektif feminisme liberal. Perjuangan para perempuan Irak juga tidak terbatas pada lingkup domestik, karena diaspora aktivis perempuan serta organisasi-organisasi perempuan Irak juga turut membantu dengan menggalang suara serta dukungan di level internasional. Perwakilan dari gerakan sosial perempuan Irak pada konferensi internasional juga berdampak terhadap kepedulian masyarakat internasional terhadap isu kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan yang terjadi di Irak.

Selain itu, berbagai macam hambatan muncul dalam rangkaian proses perjuangan gerakan sosial perempuan di Irak. Mulai dari krisis keamanan, ancaman dari kelompok pemberontak terutama kepada para aktivis perempuan,

serta marjinalisasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah terhadap para perempuan yang masuk ke dalam struktur pemerintahan. Namun, para anggota gerakan sosial perempuan tetap terus menyuarakan kepentingan perempuan hingga terbentuknya aturan dalam konstitusi baru Irak pada tahun 2005 yang turut memuat beberapa pasal terkait hak-hak perempuan. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang cukup baik dalam perkembangan gerakan perempuan serta perlindungan terhadap hak asasi perempuan di Irak.

5.2 Saran

Isu mengenai hak asasi perempuan terutama di negara-negara konflik seharusnya dimasukkan ke dalam pembahasan utama oleh aktor-aktor internasional, terutama oleh aktor pengambil kebijakan. Dari penelitian ini, proses dan upaya yang dilakukan oleh gerakan sosial perempuan di Irak diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para aktivis perempuan ataupun organisasi-organisasi perempuan di negara-negara konflik lainnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

